

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN
BOALEMO**

Oleh

**ADELIA A. INDE
E1118109**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
BOALEMO

Oleh

ADELIA A. INDE

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dan telah

Di Setujui oleh Tim Pembimbing

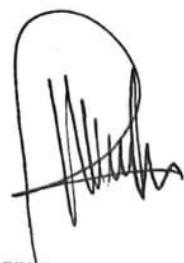
Kamis, 02 Juni 2022

PEMBIMBING I



Dr. H. ABDUL GAFFAR LATJOKE.,M.Si PARMIN ISHAK,S.Akun.,M.Ak
NIP: 196212311987031029 NIDN:0919099202

PEMBIMBING II



PARMIN ISHAK,S.Akun.,M.Ak
NIDN:0919099202

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

OLEH :

ADELIA A. INDE

E1118109

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. **Rahma Rizal,SE.,Ak.,M.Si** :
(Ketua Penguji)
2. **Nur Lazimatul Hilma Sholehah,S.Akun.,M.Ak**:
(Anggota Penguji)
3. **Shella Budiawan, SE., M.Ak** :
(Anggota Penguji)
4. **Dr. Dr.H.Abdul Gaffar Latjoke.,M.Si** :
(Pembimbing Utama)
5. **Parmin Ishak,S.Akun.,M.Ak** :
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Hasil ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggilainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



ADELIA A. INDE
NIM : E1118109

Motto dan Persembahan

PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirahim...

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah S.W.T, karena kepadaNyalah kami menyembah dan kepadaNyalah kami mohon pertolongan. Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada:

- ❖ Papa yang Terhebat **ARWAN B. INDE**, dan Teristimewa untuk Ibuku **RATNA LAIYA S,Pd** untuk papa terimakasih banyak sampai tahap ini masih kuat, sehat, dan selalu berjuang dan mendoakanku dalam setiap langkahku untuk bisa selesaikan tanggung jawabku yang kalian titipkan dibahuku. Untuk Ibuku berkat doa-doamu aku bisa wujudkan mimpiku dan tanggung jawabku untuk menyelesaikan skripsiku ini.
- ❖ Untuk suamiku, **MOHAMAD FAIR YUSUF** terima kasih banyak telah hadir dalam kehidupanku untuk menggantikan sosok papaku, terima kasih atas kasih sayang dan cinta kasihmu kepadaku karena telah menyayangiku selama ini. Atas doa-doamu aku bisa sampai ditahap ini.
- ❖ Anakku tersayang **ananda NAIRA HASANAH YUSUF** terima kasih nak, kamu telah hadir dalam hidup ibu, terima kasih juga kamu telah lahir dengan selamat didunia ini, kamu adalah rahmat Allah yang kami nantikan.
- ❖ Untuk ibu mertuaku, **YULANDA YUSUF S,SOS** terima kasih juga bu telah banyak membantuku dalam proses penggerjaan skripsiku ini.
- ❖ Untuk kalian sahabatku, **Gina, Afni** dan **Kirana** terimakasih juga telah menjadi support sistem terbaik untukku.
- ❖ Teman-teman akuntansi angkatan 2018 **Rahma, yuliana, winda, dexi, ka ulfa, ka indra, pak zulkifli** yang telah berjuang bersama dari awal sampai sekarang.
- ❖ Dan terutama untuk bapak ibu dosen yang selalu memberikan motivasi dan menjadi sumber inspirasi untuk kami.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU**

2022

ABSTRACT

ADELIA A. INDE. E1118109. THE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE AT THE REGIONAL GOVERNMENT OF BOALEMO REGENCY

This study aims to find and analyze the performance of regional revenue and expenditure of the Boalemo Regency government. This study employs a qualitative type of research method. The data source of this study is taken from the regional financial report data. The results of this study indicate that the performance of the Boalemo regency government is good. It is measured by looking at the effectiveness value of 2018, 2019, and 2020 with very effective criteria. It is in contrast to the effective value of the Local Own-Source Revenue which is categorized as inefficient criteria. If seen based on the percentage of the Local Own-Source Revenue efficiency value, the government has tried to efficiently use the budget. The local government is also trying to increase the Local Own-Source Revenue so that the region becomes an independent region.



Keywords: regional financial management, economy, effectiveness, efficient

ABSTRAK

ADELIA. A. INDE. E 1118109. ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Boalemo. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sumber data penelitian ini sumber datanya diperoleh dari data laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten boalemo sudah bagus/baik, dengan dilihat nilai efektifitas dan tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan kriteria sangat efektif, berbeda dengan Efisiensi PAD dengan criteria tidak efesien, tetapi jika dilihat dari perbedaan nilai efesien PAD pemerintah berusaha untuk bisa mengefisiensi penggunaan anggaran, serta pemerintah daerah juga berusaha untuk meningkatkan PAD agar daerah menjadi daerah yang mandiri.

Kata kunci: pengelolaan keuangan daerah, ekonomi, efektifitas, efisien



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.....

Alhamdulillahirobbil'alamin, banyak nikmat yang telah ALLAH berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat, segala puji hanya untuk Allah Tuhan yang maha Esa atas segala Berkah, Rahmat, serta Hidayahnya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini judul “ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Si.,C.Sr selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr.H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Dr. Musafir, Se.,M.Si. Ibu Melinda Ibrahim, SE.,M.SA Selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr.H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, koreksi serta mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini. Bapak Parmin Ishak, S.Akun., M.Ak Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, koreksi serta mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini, Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam

mengerjakan skripsi ini, ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang telah membantu/mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Teman-teman seperjuangan Akuntansi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan penulis dimasa yang akan datang. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, dukungan, serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Maksud Penelitian	5
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Bagi Praktisi	6
1.4.2 Bagi Teoritis	6
1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Kajian Pustaka	7
2.1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah	7
2.1.2 Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).....	8
2.1.2.1 Tujuan dan fumgsi APBD	10
2.1.2.2 Pendapatan	11
2.1.2.3 Pembiayaan Daerah	11
2.1.3 Value For Money.....	12
2.1.4 Laporan Keuangan	13
2.1.4.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20
2.1.5 Analisis Pendapatan Dan belanja Daerah	22
2.1.5.1 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah	23

2.6 Penelitian Terdahulu	29
2.2 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian	32
3.2 Metode Yang di Gunakan	32
3.2.2 Operasional Variabel Penelitian	32
3.2.3 Populasi Dan Sampel Penelitian.....	33
3.2.3.1 Populasi	33
3.2.3.2 Sampel.....	33
3.2.4 Sumber Dan Tata Cara Pengumpulan Data.....	33
3.2.5 Metode Analisis.....	34
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1Sejarah Singkat Sekretariat Daerah kabupaten Boalemo	40
4.1.2Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo	42
4.2 Hasil Penelitian	47
4.2.1Mengukur APBD Secara Ekonomis	47
4.2.2Mengukur APBD Secara Efektif Dan EFesien.....	51
4.2.3Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah.....	59
4.3 Pembahasan.....	62
4.3.1Mengukur APBD Secara Ekonomis	62
4.3.2Mengukur APBD Secara Efesien dan Efektif	66
4.3.3Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Value for Money	13
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo	46
Gambar 4.2 Rasio Derajat Desentralisasi.....	64
Gambar 4.3 Rasio Efektifitas PAD.....	67
Gambar 4.4 Rasio Efisiensi PAD.....	68
Gambar 4.5 Rasio Efisiensi Belanja.....	69
Gambar 4 Rasio Kemandirian Daerah.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi pendapatan daerah Kab. Boalemo	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2.2 Nilai Efektifitas PAD	25
Tabel 2.3 Nilai Efektif PAD.....	26
Tabel 2.4 Nilai Interpretasi Kemandirian Daerah.....	28
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	33
Tabel 3.2 Nilai Efektifitas PAD	36
Tabel 3.3 Nilai Efesien PAD.....	37
Tabel 3.4 Nilai Interpretasi Kemandirian Keuangan Daerah.....	38
Tabel 4.1 Rincian Derajat Desentralisasi	50
Tabel 4.2 Nilai Efektifitas PAD	51
Tabel 4.3 Rincian Rasio Efektifitas PAD	53
Tabel 4.4 Nilai Efesien PAD	54
Tabel 4.5 Rincian Rasio Efesien PAD	56
Tabel 4.6 Rincian Rasio Efesiensi Belanja.....	58
Tabel 4.7 Nilai Imtrerpretasi Kemandirian Daerah.....	59
Tabel 4.8 Rincian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	61
Tabel 4.9 Analisis Varians	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah 2018	76
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah 2019	77
Lampiran 3	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah 2020	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sektor publik sering kali di artikan sebagai suatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya. (Muh. Mahsun 2013)

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan setiap laporan keuangan daerah kemasyarakatan. Di dalam pelaporan keuangan daerah yang paling berpengaruh adalah pendapatan dan belanja daerah yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan dituangkan dalam APBD.

Empat laporan keuangan yang wajib diterbitkan ialah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Akan tetapi demi untuk menguasai efisiensi dan efektivitas (nilai moneter) pemerintah daerah, kita mampu dalam melihat kinerjanya lewat laporan realisasi anggaran. Dalam laporan realisasi anggaran dijelaskan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama periode laporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran ialah guna untuk memberi penerangan tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor secara komparatif. Laporan realisasi anggaran adalah jenis laporan keuangan daerah yang isinya lebih dulu dikeluarkan, dan kemudian sinyal dikeluarkan untuk di terbitkannya laporan neraca dan arus kas. Anggaran pemerintah merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan cara pemerintah daerah untuk menggali sumber pendanaan dari potensi sumber daya dan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber pendanaan yang ada.

Anggaran sebagai sarana penting untuk menstabilkan, mengalokasikan, mengalokasikan sumber daya publik, mengatur perencanaan dan pengendalian, dan evaluasi kinerja.

Oleh karena itu, laporan realisasi anggaran ialah salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sensial. Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab, meskipun terdapat perbedaan aturan atau norma akuntansi atas laporan keuangan milik swasta, perlu dilakukan analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah. Dengan lebih memperhatikan keadaan pemerintah daerah, penulis tertarik mengajukan beberapa pertanyaan untuk menganalisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah.

Hampir seluruh daerah di Indonesia, dan beberapa daerah terdapat dana perimbangan dan pembayaran transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi termasuk kabupaten Boalemo. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas di Provinsi Gorontalo, daerah ini juga merupakan daerah yang sangat berpenghasilan dibandingkan dengan daerah tetangga lainnya di Provinsi Gorontalo yang diukur dari tahun 2015 hingga 2019 saat APBD direalisasikan. Kabupaten Boalemo terus tumbuh dengan laju yang mengkhawatirkan, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 10%. Sebagai Pemerintah Daerah yang menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Boalemo mesti lebih memajukan otonomi daerah dengan menekan ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Pengembangan kemandirian terkait erat dengan pengelolaan pendapatan asli daerah. sebab daerah otonom diharapkan mandiri dari menggantungkan kepada pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pemerintah daerahnya, dimana pendapatan asli daerah mesti menjadi bagian penting dalam menggerakkan dana

pengelolaan pemerintah daerah. Maka demikian bisa dipastikan bahwa daerah menyumbang melalui Pendapatan asli daerah (PAD) dengan rata-rata persen setiap tahunnya, ini terlihat pada tabel sebagai berikut:

Table 1.1.
Realisasi pendapatan daerah Kab.Boalemo

Tahun	Uraian	Pendapatan Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain pendapatan yang sah
2018	Anggaran	854,163,412,956	63,871,658,356	694,087,639,000	6,847,917,600
	Realisasi	844,634,717,802,14	71,687,164,839,14	674,265,495,460	6,908,817,600
2019	Anggaran	855,370,681,938	50,121,011,938	691,915,891,000	23,366,200,000
	Realisasi	840,597,328,952,56	56,019,131,871,56	670,704,338,538	23,256,720,000
2020	Anggaran	881,273,678,181	69,752,764,281	677,593,093,000	25,090,400,000
	Realisasi	869,820,806,157,67	70,712,830,833,67	660,487,881,234,	28,491,720,000

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo

Dari pernyataan di atas dan tabel di atas, penulis mempunyai beberapa pendapat, yaitu ketergantungan daerah pada pemerintah pusat sebenarnya memiliki pengaruh positif dan negatif, dan dampak positifnya bagi daerah adalah dapat menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat. Hal ini dapat memperluas penyaluran dana perimbangan yang cukup tinggi. Dukungan daerah untuk meningkatkan penyerapan belanja daerah, dan dampak negatifnya jika keadaan ini terus berlanjut, dan daerah tidak melakukan upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan PAD, PAD akan tetap kecil, dan originalitas pemerintahan tetap diperlukan. Untuk meningkatkan PAD tidak hanya dari perpajakan dan retribusi, yang jumlah rata-ratanya hanya 4,13% dari total pendapatan saat ini.

Semua masalah inilah yang menjadi latar belakang sehingga penulis tertarik mengambil judul **“ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka permasalahan yang timbul pada garis besarnya adalah bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Boalemo dalam mengelola anggaran dan pendapatan belanja daerah ditinjau dari aspek Ekonomis, Efesiensi, dan Efektif.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian untuk menganalisa kinerja pemerintah Kabupaten Boalemo dalam mengelola anggran pendapatan dan belanja daerah ditinjau dari ekonomis, efisiensi dan efektifitas keuangan daerah yang meliputi : Analisis varians pendapatan, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Efesiensi Belanja.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sesuai rumusan masalah di atas yaitu menganalisis bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Boalemo dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah ditinjau dari aspek ekonomis,efesiensi,efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Sebagai acuan untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki sistem

pengelolaan anggaran daerah khususnya anggaran dan pendapatan pada tahun anggaran yang akan datang.

a. Bagi penulis

Memperoleh pengetahuan baru dan meningkatkan keterampilan seseorang dalam akuntansi sektor publik, khususnya di bidang keuangan kota dan membandingkan teori berbasis kuliah dengan praktik praktis adalah tujuan dari proyek ini.

b. Bagi pemerintah daerah

Tambahan sumber informasi dan masukan untuk mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah dan alternatif teknik perbaikan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah

c. Bagi masyarakat

Kesimpulannya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa itu dirancang untuk memberikan informasi penting kepada publik mengenai kinerja keuangan dan sejauh mana anggaran pendapatan dan belanja daerah telah tercapai, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan publik dana oleh pemerintah daerah.

2. Bagi Teoritis

Hal ini berpotensi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang administrasi anggaran dan pendapatan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Memiliki potensi untuk dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut AICPA “*Accounting is the recording, Classifying and summarizing, in significant manner and in term of money, transaction and event, which are in part at least, of financial character, and interpreting the result thereof*”. Yang di dalamnya mengandung inti mengenai :

Recording : Pencatatan

Classifying : pengklarifikasi, penggolongan

Summarizing : pengikhtisaran / posting

Interpreting : penganalisan

Dalam karya Rowan Jones dan Mauricie (Rowan Jones dan Mauricie, 1989) disebutkan bahwa sektor publik adalah salah satu jenis pengelolaan keuangan dari publik yang bermuara pada konsekuensi akuntabilitas kepada publik. Oleh karena itu, manajemen harus terbuka dan bertanggung jawab kepada publik. Di Indonesia, sektor publik masih dianggap sebagai trend perkembangan di bidang akuntansi, dalam kurun waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bertentangan dengan pandangan Profesor H. Muindro Renyowijoyo, akuntansi sektor publik merupakan cara lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan kepada publik.

Pengertian akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) entitas pemerintah daerah (daerah, kota atau provinsi). (Abdul Halim) 2008: 36), dan menurut Muindro (2013: 115), akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan mengelola keuangan daerah. *American Accounting Association* menyatakan bahwa tujuan organisasi sector public adalah:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi dengan benar, efektif, dan ekonomis.
2. Memberikan informasi sehingga manajer dapat dengan cepat dan efektif melaporkan kinerja tugas mereka, pengelolaan dan penggunaan sumber daya, dan memungkinkan pejabat pemerintah untuk melaporkan kepada publik hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran adalah pernyataan tentang ekspektasi kinerja yang diharapkan organisasi yang dinyatakan sebagai pengukuran pengukur tekanan selama periode waktu tertentu. Anggaran sektor publik harus mencakup tiga bidang, termasuk perencanaan, pengendalian, dan tanggung jawab publik. Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2011) mengemukakan bahwa anggaran tidak dalam bentuk berbagai rencana, walaupun tidak setiap rencana disebut anggaran, anggaran dapat dalam bentuk berbagai rencana. Agar fungsi perencanaan dan pemantauan dapat berfungsi dengan baik, sistem anggaran serta pencatatan pendapatan dan belanja

harus dilaksanakan secara cermat dan sistematis. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang rencana kerja atau prosedur sehingga dapat memberikan arahan dan kontrol yang baik untuk setiap kegiatan. Anggaran sektor publik telah menjadi kontrol dan patokan untuk setiap kegiatan, sehingga dalam sistem tersebut telah banyak terjadi perkembangan dalam rencana anggaran sektor publik. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Tahun ke-5 tahun 1974, APBD diartikan sebagai rencana penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan daerah, di satu sisi merupakan tahun anggaran untuk kegiatan dan proyek daerah.

APBD menurut undang undang no. 32 tahun 2004 dijelaskan dalam Bab VIII dari paragraph satu sampai dengan paragraph kesebelas, antara lain :

1. APBD menurut Pasal 1 UU. Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah No. 32 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Administrasi pendanaan urusan pemerintah daerah dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan pemerintah (pusat) di daerah (pasal 155).
3. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan di tentukan dengan peraturan daerah (perda). Struktur APBD menurut PP 58 pasal 20 terdiri dari PAD, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.1.2.1 Tujuan dan Fungsi APBD

Seperti APBN, APBD juga mempunyai tujuan dan fungsinya berikut penjelasan tentang tujuan dan fungsi APBD.

1. Tujuan APBD

APBD merupakan pedoman penerimaan dan pengeluaran untuk melakukan aktivitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan APBD, pemerintah daerah mempunyai interpretasi yang jelas dan benar mengenai pendapatan dan belanja dalam satu tahun. Dengan APBD sebagai standar, kesalahan, pemborosan serta penipuan yang merugikan dapat dihindari.

2. Fungsi APBD

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Fungsi otorisasi

Fungsi otorisasi berarti APBD sebagai dasar pendapatan dan belanja pemerintah daerah tahunan yang bersangkutan

b) Fungsi perencanaan

Planning Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan tahunan terkait.

c) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengacu atas pemanfaatan “APBD” menjadi tolak ukur yang bakal menilai (mengawasi) apakah pengelolaan pemerintahan daerah sudah sinkron dengan ketentuan.

d) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi berarti APBD bahwa distribusi APBD harus layak dan bewujud demi megecilkan angka pengangguran, pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

e) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi berarti APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan saat mendistribusikan.

2.1.2.2 Pendapatan

Pendapatan ialah semua pendapatan yang mengalir ke kas daerah yang menaikkan penyertaan modal kerja yang menjadi hak Daerah pada tahun anggaran yang ditentukan, dan daerah tidak perlu dibayar kembali. Adapun sumber pendapatan daerah yang terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:

Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain lain PAD yang sah

b. Dana perimbangan

c. Lain lain pendapatan daerah yang sah

2.1.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah segala sesuatu keluaran outcome kas daerah yang meliputi :

a. Penerimaan pembiayaan yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. Pengeluaran pembiayaan

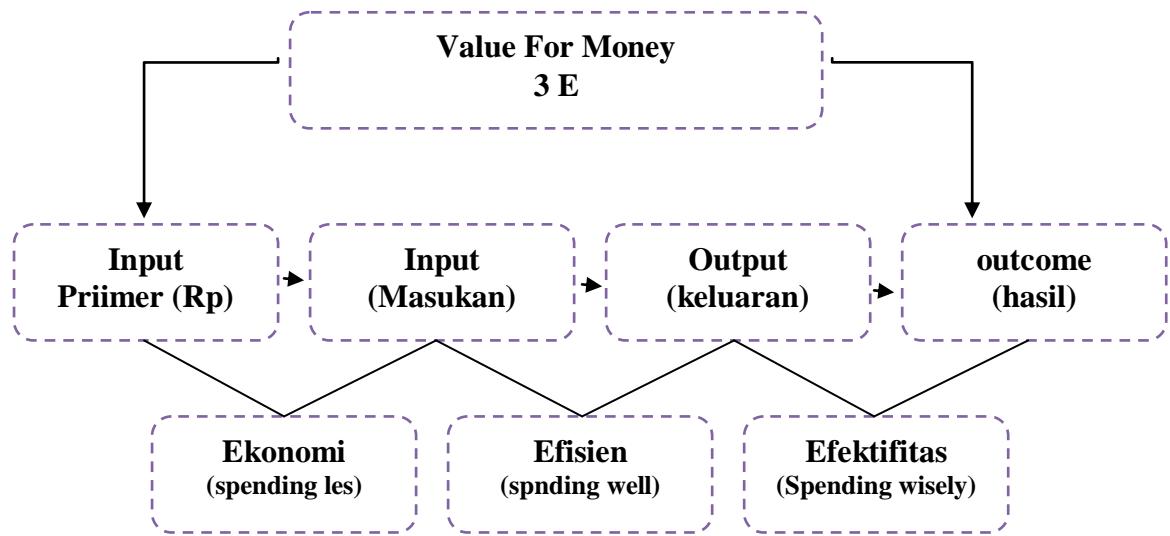
Pemerintah daerah bisa membangun cadangan untuk menggenapi kebutuhan tertentu yang tidak dapat menyajikan dana dalam satu tahun anggaran. Peraturan Pemerintah ditetapkan melalui peraturan pemerintah yang paling sedikit mengatur pembentukan cadangan dan persyaratan pengelolaan dan pertanggung jawaban.

2.1.3 *Value for Money* (VFM)

Dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *Value For Money* dalam menjalankan aktivitasnya. Mardiasmo, (2002) menjelaskan bahwa VFM adalah konsep pengelolaan organisasi sector public yang mendasarkan pada 3 elemen utama yaitu : ekonomi, efisiensi, efektifitas.

- 1.) Ekonomi adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga rendah. Ekonomi menggambarkan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya).
- 2.) Efisiensi ialah pencapaian keluaran maksimum di bawah masukan tertentu, ataupun menggunakan masukan terendah untuk mencapai keluaran. Efisiensi adalah perbandingan keluaran dan masukan terkait dengan standar atau tujuan kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.
- 3.) Efektifitas adalah ambang pendapatan hasil program dengan target yang ditetapkan secara sederhana. Efektifitas ialah pertimbangan outcome dan output.

Ketika organisasi menggunakan biaya input terkecil untuk mencapai output terbaik untuk mencapai tujuan organisasi, maka dapat mencapai nilai uang.



Gambar 2.1Value For Money

2.1.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan daerah merupakan jenis informasi yang memuat data sebagai unsur struktur kekayaan dan struktur keuangan yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Menurut Kasmir (2008: 7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan status keuangan perusahaan saat ini atau periode tertentu. Tujuan laporan keuangan daerah adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan tanggung jawab entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Munawir (2007:5) Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan dimana kedua daftar tersebut adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Adapun yang mencakup Laporan Keuangan daerah adalah:

- a) Laporan Keuangan (moneter) Daerah
- b) Neraca Daerah
- c) Laporan Arus Kas
- d) Catatan Atas Laporan Keuangan
- e) Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Menurut mahmudi bahwa jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah adalah :

1. Neraca yang terdiri dari
 - a. Asset
 - 1) Asset lancar, yang terbagi atas :
 - a) Kas dan setara kas
 - b) Investasi jangka pendek
 - c) Piutang
 - d) Persediaan
 - 2) Investasi jangka panjang, terdiri dari
 - a) Investasi non permanen
 - b) Investasi permanen
 - 3) Asset tetap
 - a) Tanah
 - b) Peralatan dan mesin
 - c) Gedung dan bangunan
 - d) Jalan, irigasi dan jaringan
 - e) Konstruksi dalam penggerjaan

- f) Akumulasi penyusutan
- 4) Dana cadangan
 - 5) Asset lainnya
- b. Kewajiban yang terdiri dari
 - 1) Kewajiban jangka pendek
 - 2) Kewajiban jangka panjang
 - c. Ekuitas dana yang diklasifikasi menjadi 3 kelompok
 - 1) Ekuitas dana lancer
 - 2) Ekuitas dana investasi
 - 3) Ekuitas dana cadangan
- 2. Laporan realisasi anggaran
- a) Pendapatan yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.
 - b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yaitu meliputi Transfer Pemerintah Pusat Berupa Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.
 - a) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

- b) Transfer Pemerintah Provinsi (khusus untuk pemerintah kabupaten/kota) yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

Pendapatan lain lain yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi :

- a. Pendapatan Hibah
 - b. Pendapatan Dana Darurat
 - c. Pendapatan Lainnya
- b.) Belanja, yang diklasifikasikan berdasarkan program dan kegiatan antara lain:

1) Belanja Tidak Langsung

Pengeluaran tidak langsung adalah pengeluaran anggaran dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan rencana dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai ialah belanja kompensasi yang berupa gaji dan tunjangan, serta pendapatan lain yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bunga

Bunga adalah beban bunga utang yang dihitung berdasarkan saldo pokok pinjaman didasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Subsidi

Subsidi adalah pengeluaran untuk memberikan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / organisasi tertentu agar harga produk / jasa yang dihasilkan dapat ditanggung oleh masyarakat.

d. Hibah

Hibah adalah pengeluaran hibah dalam bentuk uang, barang, dan / atau jasa yang secara jelas ditujukan kepada pemerintah daerah lain dan kelompok masyarakat / perorangan.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pengeluaran untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang dan / atau materi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran dana bagi hasil dari pendapatan provinsi kepada pendapatan kabupaten / kota atau kabupaten / kota kepada pemerintah desa atau beberapa pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Bantuan keuangan

Bantuan keuangan adalah pengeluaran bantuan keuangan umum atau khusus dari provinsi ke kabupaten / kota, pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, atau dari pemerintah kabupaten / kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka keadilan dan / atau peningkatan kemampuan fiskal.

h. Belanja tidak terduga

Pengeluaran tidak terduga adalah pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang kali, seperti penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak terduga, termasuk pengembalian kelebihan pendapatan daerah yang telah ditutup dalam beberapa tahun terakhir.

2.) Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja anggaran yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan rencana dan kegiatan. Belanja langsung meliputi:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah belanja remunerasi / gaji yang digunakan untuk melaksanakan rencana dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja barang dan jasa

Pengeluaran barang dan jasa mengacu pada pembelian / pembelian barang yang nilainya kurang dari 12 bulan dan / atau pengeluaran untuk menggunakan jasa dalam rangka pelaksanaan rencana dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang habis pakai, bahan / bahan, jasa perkantoran, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

c. Belanja modal

Belanja modal merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

d. Surplus/deficit

1.) Penerimaan Pembiayaan, semua penerimaan yang ditunjukkan untuk menutupdefisif APBD:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
- f. Penerimaan piutang daerah

2.) Pengeluaran pembiayaan, semua pengeluaran yang ditunjukkan untuk memanfaatkan surplus APBD

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah
- c. Pembayaran pokok utang, dan
- d. Pemberian pinjaman daerah

Laporan arus kas yang dibagi menjadi, Arus kas dari aktifitas operasi, Arus kas dari aktifitas investasi, Arus kas dari aktifitas pembiayaan dan arus kas dari aktifitas nonanggaran

3. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan yang didalamnya ialah Kebijakan fiscal / keuangan daerah, ekonomi makro daerah, pencapaian target APBD, Iktisar pencapaian kinerja keuangan, Kebijakan akuntansi daerah, Penjelasan pos-pos laporan keuangan, Pengungkapan pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk pemerintah daerah yang menggunakan basis akrual, Informasi tambahan lainnya.

2.1.4.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Mahmudi: 2010) salah satu pilar utama dalam menjaga perekonomian suatu negara adalah tanggung jawab penguasa. Atau dari perspektif lain, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah "amanah", yang artinya pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab atau dapat dipercaya adalah orang-orang yang dipercaya dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan penerimaan sebagai semua pendapatan dalam total kas negara bagian / daerah. Pendapatan ini akan dijumlahkan ke ekuitas dana saat ini selama tahun fiskal. Hal ini adalah hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Secara umum, pajak daerah dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah guna untuk meningkatkan kekayaan bersih yang dihasilkan dari transaksi di masa lalu. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan daerah adalah segala jenis pendapatan tunai yang ditransfer ke rekening kas daerah yang seluruhnya bersumber dari pendapatan asli daerah atau pendapatan pемbiayaan. Menurut standar akuntansi pemerintah, belanja daerah dapat diartikan sebagai semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas daerah biasa, pengeluaran tersebut akan mengurangi ekuitas likuiditas tahun anggaran yang bersangkutan, dan pemerintah daerah tidak dapat membayar kembali pengeluaran tersebut.(Mahmudi: 2010). Menurut peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, pengeluaran didefinisikan sebagai berikut: "Pengeluaran mengacu pada semua pengeluaran dari rekening kas biasa negara bagian/ teritori. Pengeluaran ini akan mengurangi ekuitas saat ini dari dana terutang pemerintah untuk tahun fiskal yang relevan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 memberikan definisi lain tentang pengeluaran ini. Pada tanggal 13 Desember 2006 menjadi: "Belanja merupakan keharusan pemerintah daerah dan diakui sebagai penurunan kekayaan bersih. "Pada saat yang sama, ketika pemerintah Indonesia khawatir tidak dapat dipulihkan, ia menetapkan pengeluarannya di lingkungan akuntansi pemerintah Indonesia sebagai bendahara nasional/daerah. Harap kurangi semua pengeluaran untuk modal kerja (Nordiawan: 2007).

2.1.5 Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan adalah sebuah tolak ukur suatu pemerintahan dalam menentukan arah pembangunan berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh

dalam suatu daerah, jika pendapatan tinggi maka semakin banyak pula program yang dianggarkan dalam periode tersebut dan sebaliknya.

Analisis pendapatan dan belanja daerah secara umum terlihat dari laporan realisasi Anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan untuk menilai ekonomi, efektifitas, efisiensi dari pendapatan daerah antara lain dengan cara :

1. Analisis varians pendapatan
2. Derajat Desentralisasi
3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD
4. Rasio efisiensi belanja
5. Rasio kemandirian keuangan daerah

2.1.5.1 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah

Menurut Halim (2008:232) analisis rasio keuangan adalah perbandingan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan sebagai pembanding antara rasio yang dimiliki suatu pemerintahan dengan rasio keuangan pemerintah lainnya yang terdekat atau pun yang potensinya daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan daerah tersebut dengan pemerintah daerah lainnya.

Dari kasus diatas dapat dilihat lewat beberapa alat analisis sbb:

- 1.) Analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan, Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan

dengan yang dianggarkan. Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah:

- a. Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase.
- b. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar.
- c. Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan.
- d. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan.

Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai, hal ini butuh penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target.

2.) Derajat Desentralisasi

Derajat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kontribusi maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

3.) Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD

Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Nilai Efektifitas PAD

KATEGORI	PREDIKAT
Sangat Efektif	$\geq 100\%$
Efektif	100 %
Cukup Efektif	90% - 99 %
Kurang Efektif	75% - 89 %
Tidak Efektif	$< 75\%$

4.) Rasio efisiensi PAD

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan PAD, indeks rasio efektifitas PAD saja belum cukup, karena walaupun dari sisi rasio efektivitas, indeks rasio efektivitas PAD sudah baik, namun fakta membuktikan bahwa biaya untuk mencapai tujuan tersebut sangat

tinggi. Artinya efisiensi pengumpulan PAD sangat rendah. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD.

$$\text{Rasio Efisien PAD} = \frac{\text{Biaya perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah. Secara umum nilai efisiensi PAD dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Nilai Efisien PAD

KATEGORI	PREDIKAT
Sangat Efisien	< 10 %
Efisien	10 – 20 %
Cukup Efisien	21% - 30%
Kurang Efisien	31% - 40%
Tidak Efisien	>40%

4.) Efisiensi Belanja

Efisiensi pengeluaran merupakan perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja. Rasio efisiensi pengeluaran digunakan untuk mengukur penghematan anggaran pemerintah. Rumus rasio efisiensi pengeluaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

5.) Rasio kemandirian keuangan daerah

Kriteria penting lainnya untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan.

Dalam peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan dikeluarkannya undang undang otonomi daerah, membawa konsikuensi bagi daerah yang satu dan daerah yang lainnya. Terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah. Antara lain (Abdul Halim, 2001) :

- a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah
- b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah
- c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah
- d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Abdul Halim 2001).

1. Kemampuan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan tersebut, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer pusat, provinsi dan pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Dapat di gambaran dalam rumus

$$\text{Rasio kemandirian keuangandaerah} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total dana transfer} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai interpretasi ini dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Nilai Interpretasi kemandirian Daerah

KATEGORI	PREDIKAT
Sangat kurang	0,00 – 10,00 %
kurang	10,01 – 20,00 %

sedang	20,01 – 30,00%
cukup	30,01 – 40,00%
baik	40,01 – 50,00 %
sangat baik	> 50%

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sebagai salah satu acuan penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Poma, M. D. (2015).	Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Belanja Teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan sekertariar daerah Kabupaten Boalemo	Jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan yang didasarkan atas penggunaan sumber daya dana melalui identifikasi tujuan yang akan dicapai, taktik dan cara dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan, dan penyediaan berbagai <i>input</i> atau masukan yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai ketentuan, pada praktiknya masih mengalami hambatan.
Tulangow, A. P., & Runtu, T. (2016).	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa	jenis penelitian analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif	Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 4.4 terlihat bahwa pada tahun 2015 Realisasi dan Serapan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengalami penurunan cukup tinggi dan persentase bagian PAD sebesar 75% sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif.

2.2. Kerangka pemikiran

Berdasarkan definisi diatas mengenai pendapatan daerah ialah seluruh jenis penerimaan berupa kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang

berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dari penerimaan pemberiayaan dan sejenisnya. Sedangkan belanja daerah didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Untuk menganalisis nilai ekonomi, efektif, dan efisiensi pendapatan dan belanja daerah digunakan beberapa alat analisis antara lain : Analisis varians pendapatan, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio efisiensi belanja, Rasio kemandirian keuangan daerah. Dari uraian tersebut penulis menggambarkan dalam bentuk skema / bagan kerangka pikir sebagai berikut :

ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah Ditinjau
Dari ekonomis,Efektif,Efesiensi

1. Analisis Varians Pendapatan
2. Derajat Desentralisasi
3. Rasio Efektifitas Dan Efisiensi PAD
4. Rasio Efisiensi Belanja
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Ekonomis, Efektif, Efisiensi Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah menganalisis perkembangan pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Boalemo dari data laporan keuangan tahun 2018, 2019 dan 2020

3.2 Metode penelitian

3.2.1 Metode yang digunakan

Sugiyono (2013:2) Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Boalemo sudah ekonomis, efektif, dan efisien.

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan atau menspesifikasi bagaimana variabel ini diukur. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat Apakah pendapatan dan belanja daerah kabupaten boalemo sudah ekonomi, efisien, efektif, dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2018, 2019 dan 2020.

Tabel 3.1 Operasional variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Kinerja keuangan pemerintah daerah	Rasio Keuangan prespektif APBD	1. Analisis Varians 2. Rasio Derajat desentralisasi 3. Rasio efektifitas dan efisiensi PAD 4. Rasio Efisiensi belanja 5. Rasio kemandirian keuangan daerah	Rasio

Sumber : Mahmudi (2010)

3.2.3 Populasi dan sampel penelitian

3.2.3.1 Populasi

Sugiyono (2016: 117) Populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasikan yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu, dan atribut atau karakteristik tersebut ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pemerintah Kabupaten Boalemo tahun 2018, 2019 dan 2020.

3.2.3.2 Sampel

Sampel penelitian merupakan bagian dari ciri-ciri tertentu yang disarikan dari populasi dan akan diteliti secara detail. Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada data laporan keuangan kabupaten boalemo dari tahun 2018, 2019 dan 2020.

3.2.4 Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer ialah data diperoleh secara langsung dari Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. Adapun cara pengumpulan data diperoleh dari :

- a.) Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara atau interview dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan informasi tentang data-data penelitian.
- b.) Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep berkaitan dengan masalah penelitian.

3.2.5 Metode Analisis

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis keuangan daerah, yaitu dengan meneliti dan membahas data yang ada, adapun yang dianalisis adalah realisasi anggaran perkembangan pendapatan dan belanja daerah kab. Boalemo pada tahun 2018, 2019 sampai dengan 2020.

Untuk menganalisis Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan Value For Money yaitu ekonomi, efektifitas, efisiensi. Adapun untuk menganalisis nilai rasio keuangan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD antara lain :

- 1.) Analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan, Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan

dengan yang dianggarkan. Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah:

- a. Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase.
- b. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar.
- c. Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan.
- d. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan.

Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai, hal ini butuh penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target.

2.) Rasio Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik, karena semakin tinggi pendapatan daerah maka semakin tinggi puls kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

3.) Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD

Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Nilai Efektifitas PAD

KATEGORI	PREDIKAT
Sangat Efektif	$\geq 100\%$
Efektif	100 %
Cukup Efektif	90% - 99 %
Kurang Efektif	75% - 89 %
Tidak Efektif	$< 75\%$

4.) Rasio efesiensi PAD

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan PAD, indeks rasio efektifitas PAD saja belum cukup, karena walaupun dari sisi rasio efektivitas, indeks rasio efektivitas PAD sudah baik, namun fakta membuktikan bahwa biaya untuk mencapai tujuan tersebut sangat tinggi. Artinya efisiensi pengumpulan PAD sangat rendah.Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah. Secara umum nilai efisiensi PAD dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Nilai Efisiensi PAD

KATEGORI	PREDIKAT
Sangat Efisien	< 10 %
Efisien	10 – 20 %
Cukup Efisien	21% - 30%
Kurang Efisien	31% - 40%
Tidak Efisien	> 40%

4.) Efisiensi Belanja

Efisiensi pengeluaran merupakan perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja. Rasio efisiensi pengeluaran digunakan untuk mengukur penghematan anggaran pemerintah. Rumus rasio efisiensi pengeluaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

5.) Rasio kemandirian keuangan daerah

Kriteria penting lainnya untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan.

Dalam peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan dikeluarkannya undang undang otonomi daerah, membawa konsikuensi bagi daerah yang satu dan daerah yang lainnya. Terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah. Antara lain (Abdul Halim, 2001) :

- a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah
- b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah
- c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah
- d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Abdul Halim 2001).

3. Kemampuan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber sumber keuangan, mengelola dan

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

4. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan tersebut, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer pusat, provinsi dan pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Dapat di gambaran dalam rumus

$$\text{Rasio kemandirian keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total dana transfer + pinjaman}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai interpretasi ini dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Nilai Interpretasi kemandirian Daerah

KATEGORI	PREDIKAT
Sangat kurang	0,00 – 10,00 %
kurang	10,01 – 20,00 %
sedang	20,01 – 30,00%
cukup	30,01 – 40,00%
baik	40,01 – 50,00 %
sangat baik	> 50%

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Boalemo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota di Tilamuta dan merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Jumlah penduduk kabupaten Boalemo pada tahun 2021 sebanyak 147.038 jiwa. sesuai dengan hasil data Sensus Penduduk 2010 (Mei 2010), luas wilayah Kabupaten Boalemo adalah 2.567,36 km² atau 21,02% dari luas Provinsi Gorontalo, dengan jumlah penduduk 129.177 jiwa, dan tingkat kepadatan penduduk 50,32 jiwa/km².

Menurut data terakhir (September 2011), Kabupaten Boalemo terdiri atas 7 wilayah kecamatan, yaitu: Botumoito, Dulupi, Mananggu, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta, dan Wonosari, serta 2 kelurahan dan 81 desa.

4.1.1 Struktur organiasasi

Peraturan Bupati (Perbup) tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara lebih rinci, struktur organisasi di sekretariat daerah Kabupaten Boalemo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Sekretaris Daerah
4. Staf Ahli:
 - 1) Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
 - 2) Bidang Sumber Daya Manusia, Sosial, dan kemasyarakatan
 - 3) Bidang pembangunan ekonomi dan keuangan
5. Asisten Administrasi Tata Pemerintahan:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan
 - 2) Bagian Hukum
 - 3) Bagian Organisasi
6. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial:
 - 1) Bagian Perekonomian
 - 2) Bagian Kesejahteraan Sosial
7. Asisten Administrasi Umum:
 - 1) Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 2) Bagian Humas, Protokol, dan Rumah Tangga
 - 3) Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Adapun tugas dan fungsi susunan struktur organisasi sekretariat daerah pemerintahan Kabupaten Boalemo dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bupati

Ada beberapa tugas pokok bupati dalam pemerintahan, di antaranya yaitu:

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat.
- b. Mengusulkan adanya pengangkatan wakil bupati
- c. Menyusun dan mengajukan RAPERDA tentang APBD, RAPERDA tentang perubahan APBD, dan RAPERDA tentang pertanggung

jawaban pelaksanaan APBD pada DPRD kabupaten buat dibahas bersama.

- d. Memimpin jalannya pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang jadi wewenang daerah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sudah ditetapkan bersama DPRD tingkat kabupaten.
- e. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA (peraturan daerah) tentang RPJPD (rencana jangka panjang daerah) dan RPJMD (rencana jangka menengah daerah) pada DPRD kabupaten buat dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan RKPD (rancangan kerja pembangunan daerah)
- f. Mewakili daerah kabupatennya didalam dan diluar pengadilan, serta bisa menunjuk kuasa hukum buat mewakili dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melaksanakan tugas yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakil Bupati

Wakil bupati mempunyai banyak tugas yang berat dalam mendampingi bupati, diantaranya yaitu:

- a. Membantu bupati dalam memimpin jalannya pelaksanaan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah, mengatur kegiatan perangkat daerah, menindaklanjuti setiap laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat, memantau dan mngevaluasi setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan ole perangkat daerah kabupaten.
- b. Memberi saran dan pertimbangan pada bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di daerahnya.
- c. Melaksanakan setiap tugas dan wewenang bupati, kalau bupati menjalani masa tahanan atau mempunyai halangan sementara
- d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sekretaris Daerah

Membantu Bupati dan merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah.

4. Staf Ahli

Staf ahli mempunyai tugas memberikan telaahan, mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, staf ahli menyelenggarakan fungsi hubungan kerja bersifat konsultasi dan koordinasi dengan SKPD.

5. Asisten Administrasi Tata Pemerintahan

Asisten administrasi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, mengkoordinasikan bagian pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat. Dan melaksanakan penyusunan kebijakan, melaksanakan koordinasi, melaksanakan evaluasi dan melaksanakan pembinaan administrasi.

6. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Sosial

Asisten administrasi ekonomi dan pembangunan sosial mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanakan program, pelayanan administrasi, pemantauan, evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang. Serta urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

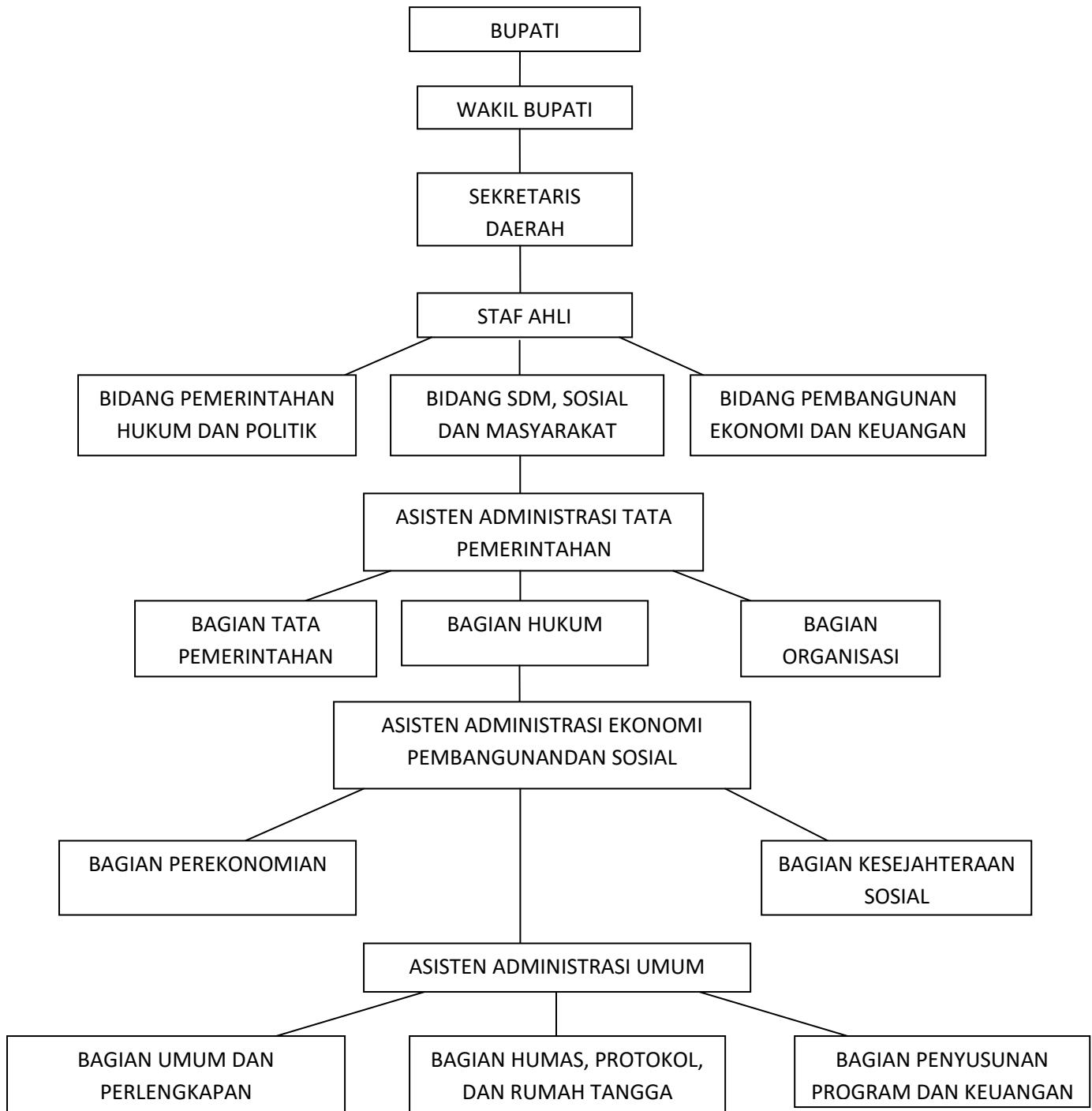
7. Asisten Administrasi Umum

Asisten administrasi umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah

dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, tata usaha pimpinan, dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, pelatihan dan keuangan serta perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Boalemo

4.2 Hasil Penelitian

Analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan prespektif APBD adalah analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio yang bersumber dari APBD dan realisasinya yang tertuang dalam laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Adapun pengukuran kinerja keuangan dengan prespektif APBD, dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Mengukur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Secara Ekonomis

1. Analisis Varians

Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{dana yang dianggarkan}$$

Berdasarkan formulasi diatas dan data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Boalemo, maka analisis variens Kabupaten Boalemo dapat dihitung sebagai berikut:

Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Analisis Varians} &= \text{Realisasi pendapatan} - \text{Dana yang dianggarkan} \\ &= 844.634.717.802,14 - 854.163.412.956,00 \\ &= -9.528.695.153,86 \end{aligned}$$

Tahun 2019

$$\text{Analisis Varians} = \text{Realisasi pendapatan} - \text{Dana yang dianggarkan}$$

$$\begin{aligned}
 &= 840.597.328.952,56 - 855.370.681.938,00 \\
 &= -Rp14.773.352.985,44
 \end{aligned}$$

Tahun 2020

Analisis Varians = Realisasi pendapatan – Dana yang dianggarkan

$$\begin{aligned}
 &= 869.820.806.157,67 - 881.273.678.181,00 \\
 &= -11.452.872.023,33
 \end{aligned}$$

2.) Derajat Desentralisasi

Derajat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kontribusi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi rasio di atas dan data laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Boalemo maka derajat desentralisasi Kabupaten Boalemo dapat dihitung sebagai berikut:

Tahun 2018

$$\begin{aligned}
 \text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{71.687.164.839,14}{844.634.717.802,14} \times 100\% \\
 &= 0,0848 \text{ atau } 8,48\%
 \end{aligned}$$

Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{56.019.131.871,56}{840.597.328.952,56} \times 100\% \\ &= 0,0666 \text{ atau } 6,66\%\end{aligned}$$

Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{70.712.830.833,67}{869.820.806.157,67} \times 100\% \\ &= 0,0812 \text{ atau } 8,12\%\end{aligned}$$

Untuk melihat rincian derajat desentralisasi dari tahun 2018,2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Rincian Derajat Desentralisasi

No.	Tahun	%
1.	2018	8,48%
2.	2019	6,66%
3.	2020	8,12%

4.2.2 Mengukur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah secara efisien dan efektif

1.) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Nilai Efektifitas PAD

KATEGORI	PREDIKAT
Sangat Efektif	$\geq 100\%$
Efektif	100 %
Cukup Efektif	90% - 99 %
Kurang Efektif	75% - 89 %
Tidak Efektif	$< 75\%$

Berdasarkan formulasi dan standar efektivitas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dihitung besarnya rasio efektifitas PAD sebagai berikut:

Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektifitas PAD} &= \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{71.687.164.839,14}{63.871.658,356} \times 100\% \\ &= 1,1220 \text{ atau } 112,2\%\end{aligned}$$

Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektifitas PAD} &= \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{56.019.131.871,56}{50.121.011.938} \times 100\% \\ &= 1,117 \text{ atau } 111,7\%\end{aligned}$$

Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektifitas PAD} &= \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{70.712.830.833,67}{69.752.764,281} \times 100\% \\ &= 1,013 \text{ atau } 101,3\%\end{aligned}$$

Untuk melihat rincian rasio efektifitas PAD dari tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Rincian Rasio Efektifitas PAD

No	Tahun	%
1.	2018	112,2%
2.	2019	111,7%
3.	2020	101,3%

2.) Rasio Efisiensi PAD

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan PAD, indeks rasio efektifitas PAD saja belum cukup, karena walaupun dari sisi rasio efektivitas, indeks rasio efektivitas PAD sudah baik, namun fakta membuktikan bahwa biaya untuk mencapai tujuan tersebut sangat tinggi. Artinya efisiensi pengumpulan PAD sangat rendah.Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD.

$$\text{Rasio Efisien PAD} = \frac{\text{Biaya perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah. Secara umum nilai efesien PAD dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.4Nilai Efesien PAD

KATEGORI	PREDIKAT
Sangat Efesien	< 10 %
Efesien	10 – 20 %
Cukup Efesien	21% - 30%
Kurang Efesien	31% - 40%
Tidak Efesien	> 40%

Berdasarkan formulasi dan standar efesiensi yang telah diuraikan diatas, maka dapat dihitung besarnya rasio efesiensi PAD sebagai berikut:

Tahun 2018

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Efisien PAD} &= \frac{\text{Biaya perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\
 &= \frac{63.871.658.356}{71.664.197.589,14} \times 100\% \\
 &= 0,8912 \text{ atau } 89,12\%
 \end{aligned}$$

Tahun 2019

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Efisien PAD} &= \frac{\text{Biaya perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\
 &= \frac{50.121.011.938}{55.947.349.488} \times 100\% \\
 &= 0,8958 \text{ atau } 89,58\%
 \end{aligned}$$

Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi PAD} &= \frac{\text{Biaya perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{69.752.764.281}{70.374.071.016} \times 100\% \\ &= 0,9911 \text{ atau } 99,11\%\end{aligned}$$

Untuk melihat rincian rasio efisiensi PAD dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Rincian Rasio Efisiensi PAD

No	Tahun	%
1.	2018	89,12%
2.	2019	89,58%
3.	2020	99,11%

3.) Rasio Efisiensi Belanja

Efisiensi pengeluaran merupakan perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja. Rasio efisiensi pengeluaran digunakan untuk mengukur penghematan anggaran pemerintah. Rumus rasio efisiensi pengeluaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi rasio efisiensi belanja yang telah diuraikan diatas, maka dapat dihitung besarnya rasio efisiensi belanja sebagai berikut:

Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{715.210.274.060,07}{830.297.639.257,40} \times 100\% \\ &= 0,8613 \text{ atau } 86,13\%\end{aligned}$$

Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{742.753.186.793,80}{819.451.631.931,47} \times 100\% \\ &= 0,9064 \text{ atau } 90,64\%\end{aligned}$$

Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{749.485.269.903,91}{796.161.786.764,23} \times 100\% \\ &= 0,9413 \text{ atau } 94,13\%\end{aligned}$$

Untuk melihat rincian rasio efisiensi belanja dari tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Rincian Rasio Efisiensi Belanja

No	Tahun	%
1.	2018	86,13%
2.	2019	90,64%
3.	2020	94,13%

4.2.3 Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah

1.) Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer pusat, provinsi dan pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Dapat di gambaran dalam rumus

$$\text{Rasio kemandirian keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total dana transfer + pinjaman}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai interpretasi ini dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 4.7 Nilai Interpretasi kemandirian Daerah

KATEGORI	PREDIKAT
Sangat kurang	0,00 – 10,00 %
kurang	10,01 – 20,00 %
sedang	20,01 – 30,00%
cukup	30,01 – 40,00%
baik	40,01 – 50,00 %
sangat baik	> 50%

Berdasarkan formulasi rasio kemandirian keuangan daerah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dihitung besarnya rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

Tahun 2018

$$\text{Rasio kemandirian keuangandaerah} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total dana transfer + pinjaman}} \times 100\%$$
$$= \frac{71.664.197.589,14}{473.141.586.552} \times 100\%$$
$$= 0,1514 \text{ atau } 15,14\%$$

Tahun 2019

$$\text{Rasio kemandirian keuangandaerah} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total dana transfer + pinjaman}} \times 100\%$$
$$= \frac{55.947.349.488,15}{482.150.465.057} \times 100\%$$
$$= 0,12\%$$

Tahun 2020

$$\text{Rasio kemandirian keuangandaerah} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total dana transfer + pinjaman}} \times 100\%$$
$$= \frac{70.374.071.016,05}{514.832.221.314} \times 100\%$$
$$= 0,1366 \text{ atau } 13,66\%$$

Untuk melihat rincian rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.8 Rincian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No.	Tahun	Presentase (%)
1.	2018	15,14%
2.	2019	0,12%
3.	2020	13,66%

4.3 Pembahasan

4.3.1 Mengukur pendapatan belanja daerah secara ekonomis

Adapun pengukuran kinerja keuangan dengan persepektif APBD, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Varians

Berdasarkan formulasi dan data laporan realisasi anggaran Kabupaten Gorontalo, maka analisis varians Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Analisis Varians

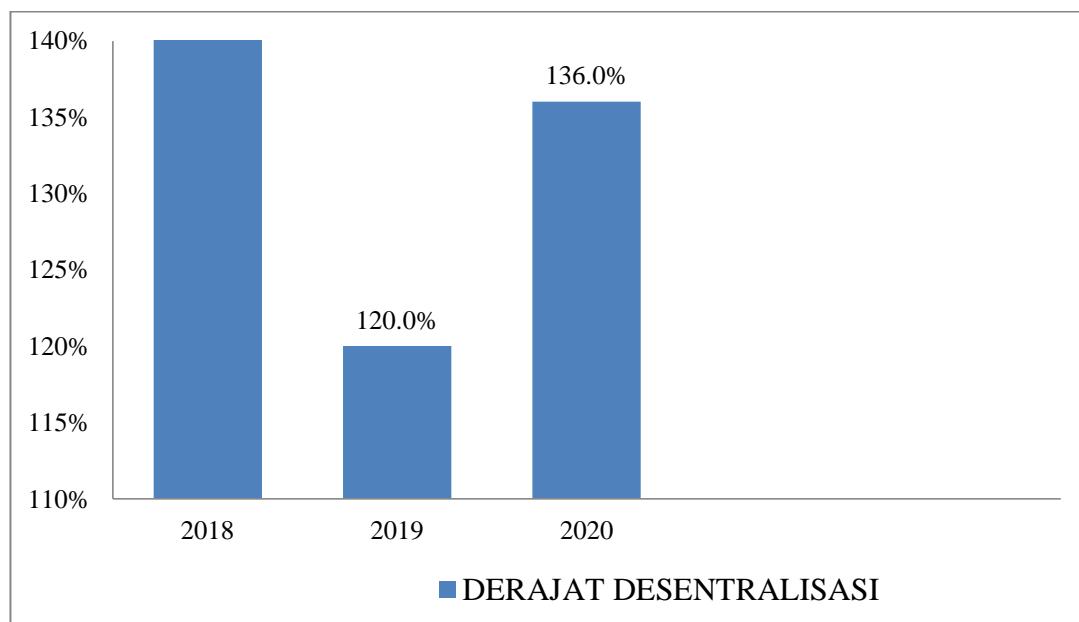
No	Tahun	Jumlah Analisis
1.	2018	-9.551.662.403,86
2.	2019	-14.845.135.368,85
3.	2020	-11.748.431.840,95

Berdasarkan dari data di atas, bahwa di 5 tahun terakhir ini secara umum terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo negatif. Hal

ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan masih dapat di toleransi atau dianggap wajar, dimana pemerintah daerah belum mampu memperoleh pendapatan yang sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Selisih anggaran pendapatan yang dapat terealisasi pada tahun 2018 Rp. 9.551.662.403,86, tahun 2019 sebesar 14.845.135.368,85, dan tahun 2020 sebanyak Rp. 11.748.431.840,95. Jumlah selisih tersebut jika dilihat dari nominalnya memang tidak begitu besar, namun jika dilihat dari presentasinya cukup signifikan. Meskipun secara nominal cukup besar, tetapi jika secara presentasi cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan realisasi pendapatan dan target pendapatan. Menurut Halim (2008 : 22) Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik.

2. Derajat Desentralisasi

Berdasarkan formulasi rasio dan data laporan realisasi anggaran Kabupaten Boalemo diperoleh nilai dari rasio derajat desentralisasi pada tahun 2018 sebesar 15,14%, tahun 2019 sebesar 0,12%, tahun 2020 sebesar 13,66%, Bila di gambarkan dalam bentuk grafik, maka data diatas akan tampak sebagai berikut:



Gambar 4.2 Rasio Dearajat Desentralisasi Tahun 2018, 2019 dan 2020

Dari gambar diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2019 terjadi tren penurunan rasio derajat desentralisasi. Pada tahun 2018 sebesar 151%, di tahun 2019 turun menjadi 120% , kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu mencapai 136,0% walaupun kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 120% .Hal ini menunjukan derajat kontribusi dari total pendapatan daerah, kontribusi pendapatan asli daerah menunjukan peningkatan, walaupun ditahun 2019 menurun. Namun kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 136,0%. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukan bahwa kemampuan daerah dalam mendominasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan yang ada didaerah. Peningkatan jumlah pendapatan asli daerah terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat.

Menurut Menurut Nafsi Hartoyo (2017) beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab rendahnya PAD.

- 1.) kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah.
- 2.) Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.
- 3.) Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.
- 4.) Kelemahan kualitas SDM aparatur.
- 5.) Kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya.
- 6.) Ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.
- 7.) sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (mark up) sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berbeda dengan catatan penyebab di atas, menurut Jaya (1996)

Mengungkapkan penyebab utama rendahnya PAD adalah sebagai berikut.

- 1.) Kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- 2.) Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat.
- 3.) Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
- 4.) Alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme.

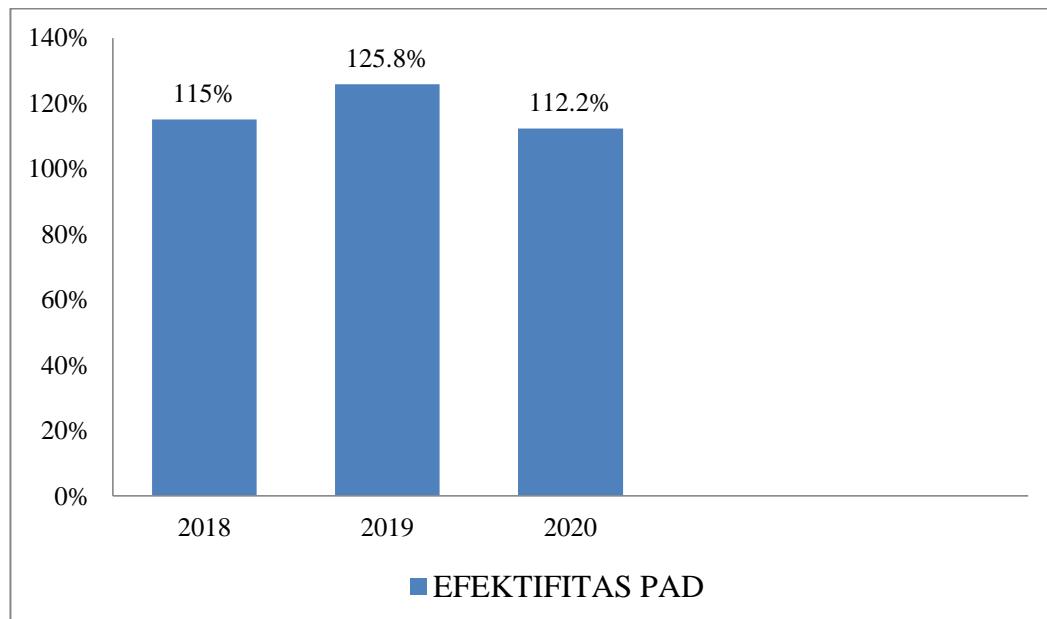
5.) Kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya.

Peningkatan Rasio derajat desentralisasi terjadi di tahun 2018,2019 dan 2020 walaupun mengalami penurunan di tahun 2019, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2020. Dengan ini diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dapat mempertahankan atau lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 yang diatur dalam UU NO. 33 Tahun 2004.

4.3.2 Mengukur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Secara Efisien Dan Efektif.

1. Rasio Efektifitas Dan Efisiensi PAD

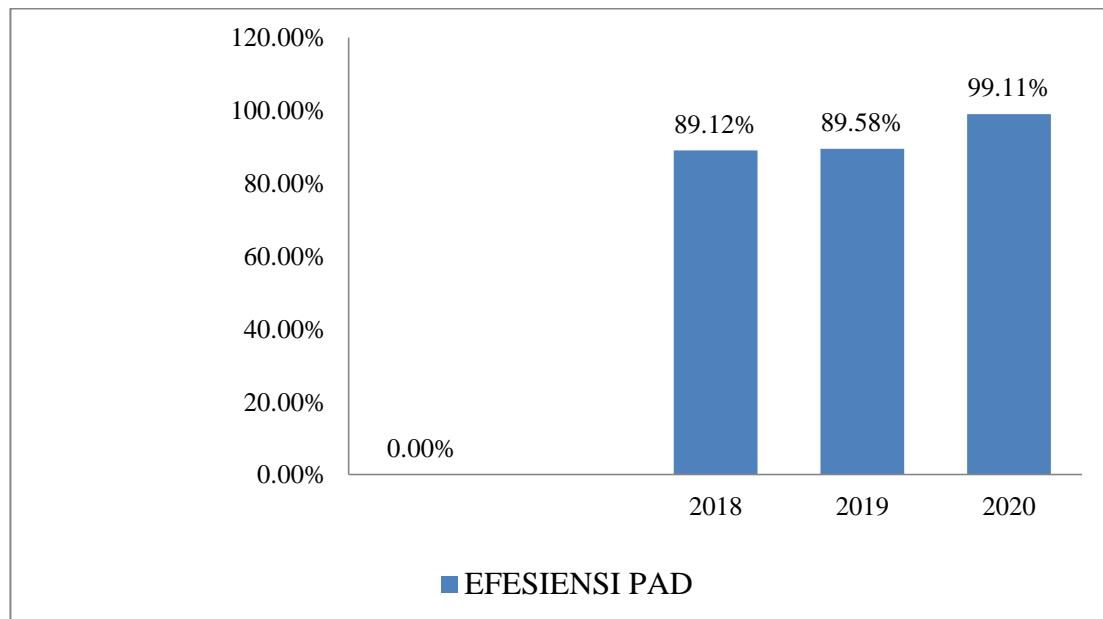
Berdasarkan hasil perhitungan rasio Efektifitas PAD, dapat diketahui bahwa besarnya rasio efektifitas PAD pada tahun 2018 sebesar 115% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2019 125,8% dan 2020 112,2% dengan kriteria sangat efektif. Dari hasil kriteria diatas dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir ini pemerintah Kabupaten Boalemo mencapai nilai efektifitas PAD yang sangat baik, dan hal ini di harapkan agar bisa di pertahankan atau lebih ditingkatkan lagi untuk daerah yang maju. Hasil ini dapat dari grafik sebagai berikut.



Gambar 4.3 Rasio Efektifitas PAD Tahun 2018,2019 dan 2020

2.Rasio Efisiensi PAD

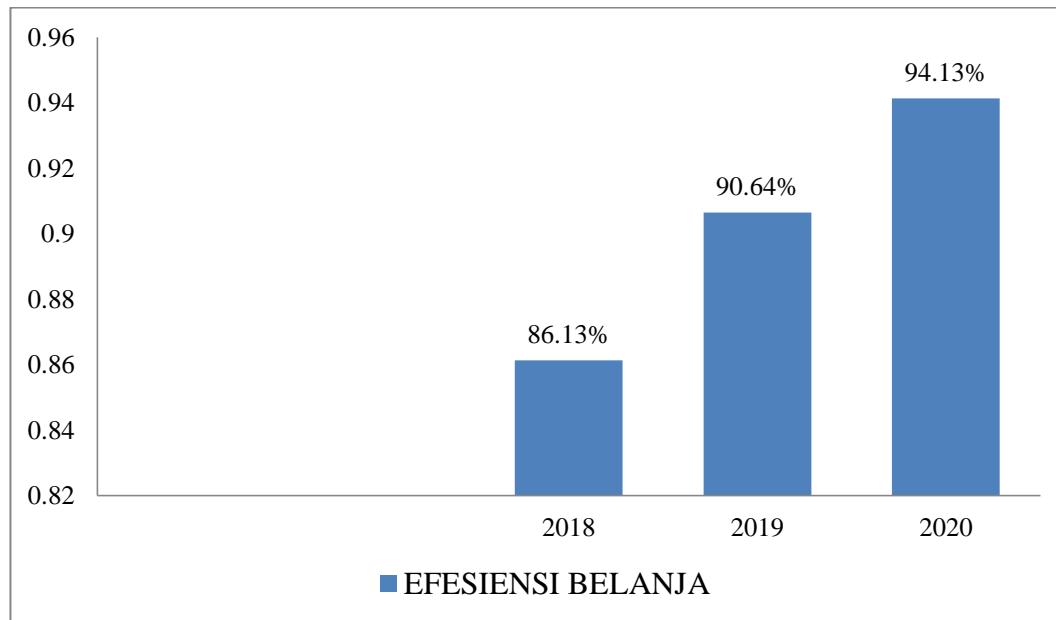
Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa efisiensi PAD pada tahun 2018 sebesar 115% dengan kriteria tidak efisien, tahun 2019 sebesar 125,8% dengan kriteria tidak efisien, dan tahun 2020 112,2% dengan kriteria tidak efisien. Rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran yang sehubungan dengan penerimaan PAD. Hasil perhitungan yang diperoleh dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.4 Rasio Efisiensi PAD Tahun 2018,2019 dan 2020

3. Rasio Efisiensi Belanja

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai efisiensi belanja pada tahun 2018 sebesar 86,13%, tahun 2019 sebesar 90,64%, tahun 2020 sebesar 94,13%. Dari data diatas jika dilihat dari Grafik adalah sebagai berikut:



Gambar 4.5 Rasio Efisiensi Belanja dari Tahun 2018,2019 dan 2020

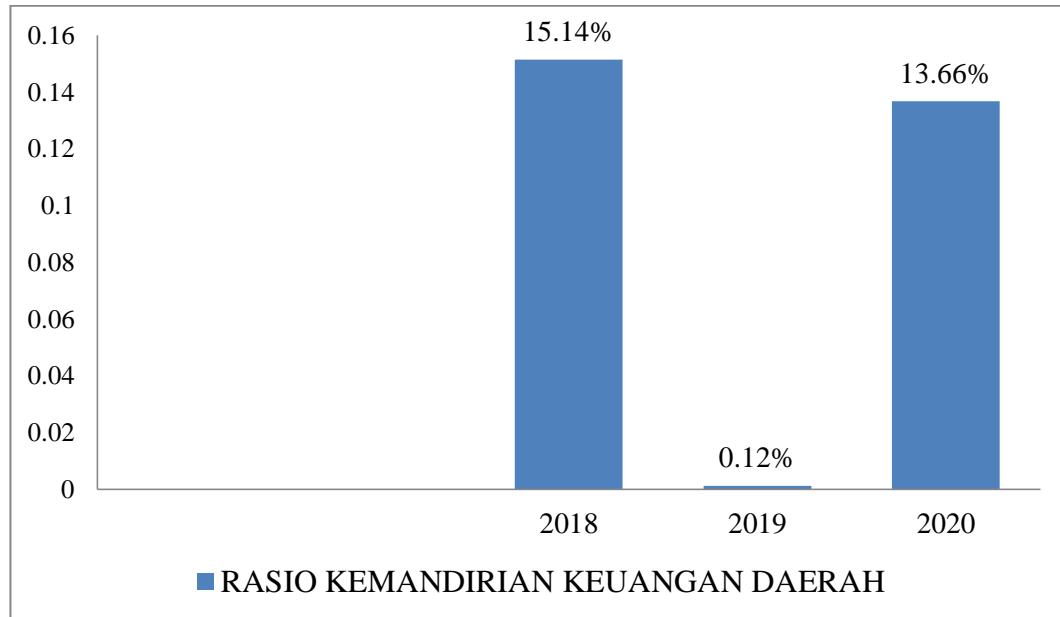
Meskipun rasio ini masih menunjukkan kondisi wajar atau dalam artian tidak lebih dari 100%, namun pemerintah daerah Kabupaten Boalemo agar lebih bisa menjaga besarnya rasio agar tidak semakin besar. Kecenderungan pemerintah dalam belanja operasi dapat menyebabkan adanya kendala didalam membangun daerah, baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan nilai ekonomi ditengah masyarakat. Sehingga pemerintah diharapkan untuk dapat menerapkan efisiensi belanja untuk daerahnya dengan demikian pembangunan daerah melalui prinsip efisiensi dapat diwujudkan.

4.3.3 Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dari perhitungan rasio kemandirian daerah dapat diketahui bahwa besarnya rasio kemandirian daerah pada tahun 2018 sebesar 15,14% dengan kriteria kurang, tahun 2019 sebesar 0,12% dengan kriteria sangat kurang, kemudian pada tahun 2020 sebesar 13,66% dengan kriteria kurang. Besarnya rasio ini menjelaskan bahwa seberapa besar pemerintah daerah mampu mandiri dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari PAD tanpa harus bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dari besaran interpretasi rasio kemandirian daerah rata-rata dibawah angka 10% - 20% dengan kriteria masih sangat kurang hal ini menjadi acuan pemerintah daerah agar lebih meningkatkan lagi rasio kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan tingkat rasio kemandirian diatas dapat dilihat bahwa

besarnya tingkat kemandirian dan kecenderungan daerah yang digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Dari grafik diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan rasio kemandirian keuangan daerah, Hal ini dapat diindikasikan bahwa pemerintah daerah senantiasa selalu berusaha meningkatkan kemandirian dengan mengoptimalkan penerimaan PAD. Dan jika dilihat dari tabel skala kemandirian daerah hasil perhitungan rasio diatas masuk menunjukkan kriteria sangat kurang sebab masih berada dibawah angka 10%-20%.

Skala kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila hasil pencapaiannya $>50\%$. Dengan angka yang masih jauh dari kriteria sangat baik, pemerintah daerah diharapkan lebih bekerja keras untuk bisa menjadi lebih baik dalam mengembangkan dan meningkatkan kemandirian daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Boalemo jika ditinjau dari Analisis Varians, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektifitas dan Efesiensi PAD, Rasio Efesiensi Belanja, dan Rasio kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Analisis Varians untuk tahun 2018, 2019, dan 2020 hasilnya berselisih negatif, yang artinya dapat diindikasikan bahwa kinerja pendapatan masih wajar walaupun belum mencapai pendapatan yang sesuai dengan jumlah yang dianggarkan.
2. Derajat Desentralisasi dilihat dari grafik derajat desentralisasi dapat disimpulkan bahwa ditahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan bahwa daerah mampu mendominasi PAD terhadap pendapatan yang ada didaerah.
3. Rasio Efektifitas dan Efesiensi PAD Pada tahun 2018 sebesar 112,2% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2019 sebesar 111,6% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2020 sebesar 100,9% dengan kriteria sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Boalemo sudah bagus didalam hal meningkatkan efektifitas PAD.
4. Sementara untuk rasio efesiensi besarnya pada tahun 2018 sebesar 89,12% dengan kriteria tidak efisien, tahun 2019 sebesar 89,58% dengan kriteria tidak efisien, tahun 2020 sebesar 99,11% dengan kriteria tidak efisien.

5. Kemudian untuk rasio efisiensi belanja pada tahun 2018 sebesar 86,13%, tahun 2019 sebesar 90,64%, tahun 2020 sebesar 94,13% dilihat dari tren rasio tersebut hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Boalemo tergolong dalam kriteria tidak efisien sdalam menggunkan anggaran belanja.
6. Untuk rasio kemandirian daerah Kabupaten Boalemo pada, tahun 2018 sebesar 15,14% dengan kriteria kurang, tahun 2019 sebesar 0,12% dengan kriteria sangat kurang, tahun 2020 sebesar 13,66% dengan kriteria kurang. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat bahwa daerah Kabupaten Boalemo dalam hal kemandirian masih sangat minim, tetapi diharapkan agar lebih meningkat demi terwujudnya daerah yang mandiri dan sejahtera.

5.2 Saran

Adapun hal-hal yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten Boalemo diharapkan agar lebih meminimalis pengeluaran biaya anggaran belanja, penggunaan anggran belanja yang yang dimaksudkan dimana pemerintah agar lebih menguatamakn belanja modal dibandingkan pada penggunaan belanja operasi. Dan diharapkan juga agar pemerintah lebih meningkatkan PAD dan tidak bergantung terhadap dan transfer pusat. Agar supaya menjadikan daerah yang mandiri dan sejahtera.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang masih menjadi kekurangan dari penelitian ini, realisasi dari penelitian ini kemudian tentang bagaimanakah pengelolaan anggaran dan pengalokasiannya agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dengan pencapaian sesuai yang

ditargetkan serta perlu adanya analisis yang tidak hanya mengacu pada analisis laporan realisasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, Gunawan, 2011. *Anggaran Perusahaan* Edisi 2. BPFE : Yogyakarta.
- Mahmudi, 2007. *Managemen Kinerja Sektor Publik*. STIM YKPN : Yogyakarta.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE : Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi : Yogyakarta
- Hanafi.M., & Halim.A.(2009). *Analisis Laporan Keuangan* Edisi Keempat UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- Poma, M. D. (2015). KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TEKNIS DI BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 2(2), 104-113.
- Renyowijoyo, Muindro, 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba. Edisi Ketiga*. Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Tulangow, A. P., & Runtu, T. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3)
- Tujuan dan Fungsi APBD <http://heritaagustini.blogspot.com/2012/10/tujuan-dan-fungsi-apbd.html> di akses pada tanggal 30 Desember 2020.
- Basariyah, Siti. 2017. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah*. Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako Palu. Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017
- BPKP. 2011. *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review
- Halim, Abdul, 20016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat
- Kartina, L. Himba, 2011. *Analisis Efisiensi Dalam Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo*.
- Mahmudi, 2015. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*

*Daerah. Yogyakarta*UPP STIM YKPN

Nurindah, Rahmawati2010. “ PengaruhPendapatanAsli Daerah dan DanaAlokasiUmumTerhadapAlokasiBelanja DaerahDi JawaTengah.

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor
21Tahun2011tentangperubahankeduaatasPeraturan MenteriDalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang*PedomanPengelolaanKeuangan
Daerah.*

PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor
29Tahun2002tentang*PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan
PengawasanKeuangan Daerah.*

PeraturanPemerintahNomor58 Tahun2005 tentang*PengelolaanKeuanganDaerah.*

Rahim, Hartati. 2014. *AnalisisPerkembanganKinerja
KeuanganPemerintahKabupatenGorontalo.* Skripsi. FakultasEkonomi–
Unisan Gorontalo.

Sugiyono, 2015.*MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R&D.*Cetakan ke
17. Bandung. Alfabeta

Untari, R. 2015. *AnalisisEfisiensiDan
EfektifitasPelaksanaanRealisasiAnggaranBelanjaLangsung Dinas
PendidikanKotaSemarang.*Skripsi, FakultasEkonomi&Bisnis.
<http://eprints.dinus.ac.id/17224/>

Undang-undangNomor17 Tahun 2003 tentang*Keuangan Negara*

Undang-undangNomor25 Tahun 2009 tentang*PelayananPublik..*

Undang-undangNomor33 Tahun 2004 tentang*Pemerintah Daerah.*

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3792/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Adelia A. Inde

NIM : E1118109

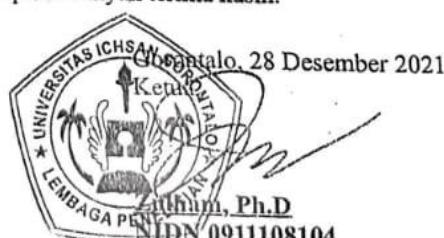
Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : KANTOR PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Judul Penelitian : ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat: Jln. Merdeka, Limbato-Tilamuta Kode Pos 96263

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati Kabupaten Boalemo:

Nama : **Dr. Hi. SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo

Menerangkan Kepada:

Nama : **ADELIA A. INDE**
NIM : E1118109
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari KESBANG POL dan LINMAS Nomor: 070/Kesbangpol/11/I/2022 yang tertanggal 31 januari 2022, maka dengan ini kami selaku Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo menerangkan kepada mahasiswa yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo dengan Judul penelitian **“Analisis Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tilamuta, 21 Mei 2022



Dr. Hi. SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KANTOR KESBANG POL & LINMAS

Alamat : JL. Sultan Hasyim, Desa Modeloma, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

REKOMENDASI

Nomor : 070/KesbangPol/16/II/2022

Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas Kabupaten Boalemo, setelah membaca Surat dari Ketua Lemlit Universitas Ichsan Gorontalo. Nomor : 3792/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2021 Tanggal 28 Desember 2021 Penhal Permohonan Penelitian maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

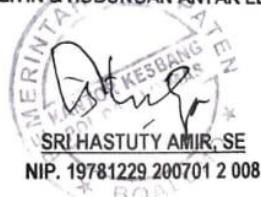
Nama : Adelia A. Inde
NIM : E1118109
Fak/Prodi : Ekonomi/Akuntansi
Alamat : Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo
Judul Penelitian : "Analisis Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo"
Lokasi Penelitian : Di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo
Waktu : 2 (dua) Bulan Terhitung sejak Tanggal 02 Februari s/d 02 April 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama mengadakan Penelitian agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Pemerintah setempat yang menjadi obyek penelitian.
2. Tidak dibenarkan menggunakan rekomendasi ini untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Penelitian.
3. Setelah melakukan Penelitian agar menyampaikan 1 eksemplar laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kab. Boalemo Cq. Kakan Kesbang Pol Kab. Boalemo
4. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali atau dinyatakan tidak berlaku apabila peneliti tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Tilamuta, 02 Februari 2022
A.n KEPALA KANTOR KESBANG POL
KABUPATEN BOALEMO
KASIE POLITIK & HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


SRI HASTUTY AMIR, SE
NIP. 19781229 200701 2 008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Boalemo (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Lemlit UNISAN Gorontalo
3. Yth. Kabag Umum SETDA Kabupaten Boalemo
4. Yang bersangkutan
Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 182/SRP/FE-UNISAN/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 09281169010
Jabatan : Dekan

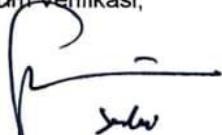
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Adelia A. Inde
NIM : E1118109
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Perkembangan Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 23 Juni 2022
Atas Verifikasi,

Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● **26% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 26% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	123dok.com	7%
	Internet	
2	portal.boalemokab.go.id	4%
	Internet	
3	cerdika.com	4%
	Internet	
4	setda.mukomukokab.go.id	3%
	Internet	
5	id.wikipedia.org	2%
	Internet	
6	text-id.123dok.com	1%
	Internet	
7	peraturan.bpk.go.id	1%
	Internet	
8	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	



Similarity Report ID: oid:25211:17777973

- | | | |
|----|--|-----|
| 9 | sumut.bpk.go.id | <1% |
| | Internet | |
| 10 | digilibadmin.unismuh.ac.id | <1% |
| | Internet | |
| 11 | LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16 | <1% |
| | Submitted works | |
| 12 | repository.uma.ac.id | <1% |
| | Internet | |

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Adelia A. Inde
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Tilamuta, 14 Desember 1999
4. Nim : E1118109
5. Agama : Islam
6. Alamat : Desa Hungayonaa, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo
7. No.Hp : 082293989986
8. Email : adeliainde14@gmail.com

B. Riwayat Hidup

1. SD : SDN 11 Tilamuta
2. SLTA Sederajat : SMP Negeri 01 Tilamuta
3. SLTA : SMA Negeri 01 Boalemo
4. Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Ekonomi
Program Studi S1 Akuntansi 2018-2022